

BAB IV

A. Geografis Thailand

1. Informasi umum tentang Thailand

Thailand memiliki Buddhisme sebagai agama nasional. Orang Thailand dapat mempraktikkan agama yang berbeda, tetapi lebih dari 90% dari mereka beragama Buddha. Orang Thailand juga mempraktikkan Islam, Kristen, Brahmanisme, Hindu, dan Sikhisme, antara lain. Konstitusi Thailand dan undang-undang lainnya. Memberikan perlindungan yang baik dalam hal agama Itu tidak memaksa orang Thailand untuk mempraktikkan agama tertentu, dengan asumsi bahwa individu memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka, bahkan denominasi agama. Dan pedoman detail yang berbeda, namun memiliki prinsip yang sama, yaitu mengajarkan setiap orang untuk beramal. untuk kesejahteraan orang tersebut secara fisik dan mental, yang akan membawa kedamaian bagi masyarakat Thailand secara keseluruhan Nama resminya adalah kerajaan Thailand Ini adalah negara-bangsa yang terletak di Asia Tenggara. Awalnya dikenal sebagai "Siam" Pemerintah resmi mengganti namanya menjadi Thailand sejak tahun 1939.

Thailand merupakan negara terluas ke-50 di dunia dengan luas wilayah 513.120 kilometer persegi. Dan memiliki populasi terbesar ke-20 di dunia, sekitar 70 juta jiwa, berbatasan dengan Burma di utara dan barat Laos di utara dan timur Kamboja di timur dan Malaysia di selatan Bangkok adalah pusat administrasi negara dan kota terbesar di negara itu. dan administrasi provinsi Diorganisasikan menjadi 76 provinsi Meskipun pembentukan monarki dan demokrasi parlementer pada tahun 1932, militer masih memainkan peran besar dalam politik Thailand. Kudeta terakhir terjadi pada tahun 2014.

Memenuhi Bukti penduduk terus menerus di Thailand saat ini telah ditemukan sejak 20.000 SM. Orang Thailand mulai bermigrasi ke daerah ini pada abad ke-11 dan datang dari berbagai daerah. termasuk penting Kerajaan Sukhothai Kerajaan Lanna dan Kerajaan Ayutthaya Sejarahwan sering menganggap Kerajaan Sukhothai sebagai awal sejarah Thailand. Belakangan,¹ Kerajaan Ayutthaya berangsur-angsur menjadi lebih kuat di wilayah tersebut pada akhir abad ke-14 alih-alih Kekaisaran Khmer Kerajaan Ayutthaya mampu mencaplok Sukhothai sebagai bagian dari kerajaannya sendiri. Kontak dengan negara-negara Barat dimulai dengan diplomat Portugis pada tahun 1511. Perang dengan Burma menyebabkan hilangnya kota tersebut pada tahun 1569, tetapi Raja Naresuan Agung Dia memproklamkan kemerdekaan dalam 15 tahun Kerajaan sangat makmur pada masa pemerintahan Raja Narai Agung. Namun setelah itu kekuasaannya berangsur-angsur menurun karena sebagian pembagian tanah yang telah terjadi pertumpahan darah selama banyak pemerintahan.

Hingga akhirnya Ayutthaya hancur total pada tahun 1767 oleh Raja Thonburi. Dia mengumpulkan tanah yang rusak menjadi berbagai kerajaan. dan mendirikan kerajaan Thonburi yang berusia 15 tahun. Awal dari dinasti Chakri dari Rattanakosin.² Periode Rattanakosin awal Sebuah kerajaan dapat menghadapi ancaman dari negara tetangga. namun setelah masa pemerintahan (*Raja Mongkut*) Negara-negara Barat telah menjadi sangat berpengaruh di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan akses ke beberapa perjanjian tidak adil yang dimulai dengan Perjanjian Bowring, namun Siam tidak pernah dijajah oleh negara Barat mana pun. Ada modernisasi Siam dan konsolidasi kekuasaan yang berkuasa pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn.

¹ Dedi Supriadi, Sejarah Peradaban Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 211.
Hassan Shadili, Ensiklopedi Indonesia, Edisi khusus, jilid 6 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van

² <https://www.kpjhospital.com/Newsite>

Siam bergabung dengan Sekutu dalam Perang Dunia I pada tahun 1917. Pada tahun 1932, terjadi revolusi yang mengubah pemerintahan menjadi monarki demokratis. Partai Rakyat memainkan peran utama dalam politik. Dan pada dekade Buddhis tahun 1937, Perdana Menteri Marsekal Lapangan Plaek Phibunsongkhram menerapkan kebijakan nasionalis yang intens. selama Perang Dunia II Thailand bergabung dengan Kekuatan Poros Tetapi sebagian besar Sekutu tidak menerima deklarasi perang. selama perang dingin Thailand adalah sekutu Amerika Serikat yang mendukung pemerintahan militer.

Kudeta tahun 1957 yang dipimpin oleh Marsekal Sarit Thanarat membawa negara itu ke era kediktatoran militer total. Pemerintah memulihkan kekuasaan kerajaan dan menerapkan kebijakan anti-komunis di wilayah tersebut. Akibat peristiwa 14 Oktober 1973, terciptalah demokrasi parlementer jangka pendek. Namun setelah peristiwa 6 Oktober dan kudeta 1976, Thailand kembali menjadi kediktatoran militer dan "Separuh Demokrasi" Thailand memiliki Perdana Menteri sejak pemilihan pertama tahun 1988. Setelah era Buddhis 1997, terjadi krisis politik antara partai pendukung dan penentang mantan Perdana Menteri Thaksin.³ Shinawatra hingga saat ini Termasuk dua kudeta Terakhir kali lahir pada tahun 2014. Konstitusi saat ini adalah edisi ke-20 yang diundangkan pada 6 April 2017.

Thailand adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, APEC, dan anggota pendiri ASEAN. Thailand telah menjadi sekutu Amerika Serikat sejak Perjanjian SEATO pada tahun 1954. Thailand adalah kekuatan utama di Asia Tenggara dan kekuatan menengah di panggung dunia. Thailand adalah negara berpenghasilan menengah-tinggi dan negara industri baru. Pendapatan utamanya dari sektor industri dan jasa. Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Secara

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani

geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan antara benua Australia dan Daratan China, Daratan India sampai Laut China. Dengan begitu, Thailand cukup mudah untuk dijangkau para pelancong dari zaman kezaman untuk mencari penghidupan maupun penyebaran agama.

Thailand nama resmi lain: (*Prades Thai, Muang Thai; dahulu Siam*). Kerajaan konstitusional di Asia Tenggara. Di sebelah Barat laut berbatasan dengan Burma, ditimur laut dengan Laos, di timur dengan Camboja, di tenggara dengan Teluk Siam, di selatan (*jazirah*) dengan Malaysia, di barat daya dengan Teluk Benggala. Luas: 514.000 km. penduduk: 4.9981.000. Kepadatan penduduk: 98/km. ibu kota: Bangkok (*Nama resmi krung Thep*) . bahasa resmi: Thai (*Siam*). Agama: Buddhisme Hinaya, Islam, Kristen. Adapun gambar peta sebagai berikut:

Tabel 4.1 Peta Kerajaan Thai dengan kota-kota penting



Tab4.2. Provinsi di Thailand

Provinsi di Thailand	
Utara	Chiang Mai • Chiang Rai • Kamphaeng Phet • Lampang • Lamphun • Mae Hong Son • Nakhon Sawan • Nan • Phayao • Phetchabun • Phichit • Phitsanulok • Phrae • Sukhothai • Tak • Uthai Thani • Uttaradit
Timur Laut	Amnat Charoen • Buriram • Chaiyaphum • Kalasin • Khon Kaen • Loei • Maha Sarakham • Mukdahan • Nakhon Phanom • Nakhon Ratchasima • Nongbua Lamphu • Nong Khai • Roi Et • Sakhon Nakhon • Sisaket • Surin • Ubon Ratchathani • Udon Thani • Yasothon
Tengah	Ang Thong • Ayutthaya • Bangkok • Chainat • Kanchanaburi • Lopburi • Nakhon Nayok • Nakhon Pathom • Nonthaburi • Pathum Thani • Phetchaburi • Prachuap Khiri Khan • Ratchaburi • Samut Prakan • Samut Sakhon • Samut Songkhram • Saraburi • Sing Buri • Suphanburi
Selatan	Chumphon • Krabi • Nakhon Si Thammarat • Narathiwat • Pattani • Phang Nga • Phattalung • Phuket • Ranong • Satun • Songkhla • Surat Thani • Trang • Yala

Thailand merupakan tempat terletaknya beberapa wilayah geografis yang berbeda. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut terdiri dari Hamparan Khorat, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand.

Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra yang melebar ke Semenanjung Melayu.⁴

a. Kerajaan Sukhothai

Sekelompok orang Thailand yang datang untuk tinggal di wilayah Khmer. Telah berkumpul dan mendirikan Kerajaan Sukhothai, merdeka dari Khmer di bawah monarki absolut Ada Phra Ruang Chao atau Pastor Khun Sri Inthathit adalah raja pertama Ada pusat administrasi di Sukhothai. atau provinsi Sukhothai saat ini Kerajaan Khmer 1 pada awal abad ke-13, menghasilkan Kerajaan Sukhothai Yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan Sukhothai berkembang luas pada masa pemerintahan Raja Ramkhamhaeng¹, namun stabilitas kerajaan melemah setelah kematiannya. karena hubungan erat antara penguasa dan rakyat Namun pada masa pemerintahan Phaya Lithai 1 Kor, bentuk pemerintahannya diubah menjadi Dharma Raja.

Dari pengaruh agama Buddha Dan Raja Sukhothai memerintah sendiri negara itu. dengan anggota keluarga kerajaan dan pejabat senior pemerintah sebagai asisten Bentuk pemerintahan pada masa itu dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu pemerintahan pusat yaitu ibu kota dan kota Luk Luang. atau kota perbatasan Dikelilingi oleh empat ibu kota, Si Satchanalai (*Sawankhalok*) di utara, Song Khwae (Phitsanulok) di timur, Sa Luang (*Phichit*) di selatan, dan Kamphaeng Phet (*Chakungrao*) di barat. Kerajaan Sukhothai diperintah oleh banyak raja berturut-turut.⁵ dan memperluas wilayah secara luas terutama pada masa pemerintahan Raja Ramkhamhaeng Agung yang menemukan alfabet Thailand untuk pertama kalinya di era kekaisaran yang paling makmur Dia mengumpulkan kota-kota menjadi banyak

⁴ "Sukhothai Kingdom". Archive archive from original source on 2015-09-24. Retrieved 2018-09-12.

⁵ lokasi kerajaan". Arsip diarsipkan dari sumber asli pada 05-06-2009. Diakses pada 25-04-2009.

penguasa sampai sulit untuk memerintah secara menyeluruh. Selanjutnya timbul masalah baik secara eksternal maupun internal, dan berangsur-angsur menurun hingga akhirnya dimasukkan sebagai bagian dari kerajaan Ayutthaya.

b. Kerajaan Ayutthaya

Kerajaan Ayutthaya 1 pada tahun 1893, yang pada mulanya juga bukan merupakan pusat rakyat Thailand di wilayah Semenanjung Indochina Semuanya, tetapi dengan kekuatan yang meningkat. Dengan metode menciptakan hubungan, katak Thailand akhirnya Ayutthaya mampu mengumpulkan berbagai kelompok Thailand di wilayah ini untuk berada di bawah kekuasaan, bahkan menjadi negara. Kekuatan super politik dan ekonomi di Asia Tenggara berkembang pesat.⁶

Intervensi terus menerus di Sukhothai menjadikan Kerajaan Sukhothai sebagai dominasi kerajaan. Ayutthaya akhirnya Raja Borommatrailokanat mereformasi pemerintahan dengan memusatkan kekuasaan ke pusat. Pendudukan Portugis di Malaka pada tahun 1511 memungkinkan Ayutthaya menjalin kontak dengan Barat. Pada masa Kerajaan Ayutthaya, terjadi kontak dengan banyak negara asing. oleh Portugis datang ke Ayutthaya pada abad ke 16. Setelah itu, bangsa yang banyak dan berperan penting yang mendiami Ayutthaya adalah Belanda, Perancis, Cina dan Jepang.

Sekitar pertengahan abad ke-16, saat Dinasti Taungoo Burma mulai memiliki kekuatan lebih. Perang panjang sejak tahun 1548 SM mengakibatkan Ayutthaya menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Taungoo. Di kerajaan Ayutthaya merupakan sebuah kerajaan yang memiliki wilayah yang sangat luas. Dari utara ke Kerajaan Lanna

⁶ "Ayutthaya, Thailand's historic city". The Times Of India. 2008-07-31.

hingga Semenanjung Malaya di selatan, hubungan internasional Ayutthaya berkembang pesat. pada masa pemerintahan Raja Narai Agung.

c. Kerajaan Thailand

Antara aktor utama konflik ini ialah kerajaan Thailand yang berpusat di Bangkok. Walau bagaimanapun, tidak semua aktor-aktor yang terdapat dalam Kerajaan Thailand terlibat dengan konflik di Selatan Thailand. Di samping kepimpinan pusat di Bangkok ianya juga melibatkan pegawai-pegawai kerajaan yang bertugas di Selatan Thailand. Jumlah pegawai kerajaan yang datang ke Selatan Thailand dianggarkan seramai 80 % dengan kebanyakan daripada mereka berbangsa Thai dan beragama Buddha serta tidak tahu berbahasa Melayu. Justeru itu, kadangkadang isu yang kecil boleh membawa kepada konflik yang lebih besar akibat salah faham komunikasi antara pegawai kerajaan dengan penduduk tempatan.

Seterusnya aktor yang langsung terlibat dengan konflik ialah pemerintah yang berpusat di Bangkok. Contohnya, Dasar Budaya Thai atau Ratthaniyom yang digubal oleh Phibul Songkram, serta dasar Nikom Sang Ton Eang Pak Tai yang digubal semasa pemerintahan Thanom Kittikhachorn. Manakala dasar-dasar lain pula wujud berdasarkan pendekatan yang dibawa oleh pemimpin sama ada ia berbentuk kekerasan atau sebaliknya.⁷

⁷ Polisi "Nikom Sang Ton Eang Pak Tai" (Felda) dilaksanakan dalam 5 wilayah, antaranya wilayah Pattani di daerah Khokpo, wilayah Narathiwat di daerah Sukkirin dan Srisakorn, wilayah Yala di Bangang Setar dan Thanto, wilayah Songkla di daerah Tiba dan wilayah Satun di daerah Khewan Kalong.

d. Kerajaan Pattani

Kerajaan Pattani (*Melayu: كراجان قتانى; Kerajaan Patani*) atau Kesultanan Patani Terletak di selatan Thailand. di Pattani, Yala, Narathiwat dan beberapa bagian Songkhla saat ini Kerajaan Pattani berdiri 500 tahun sebelum Kerajaan Siam, dimulai sebagai suku kecil dengan populasi 200-250 orang (*kepala klan saat itu*) berkuasa dan berganti setiap 1 tahun. Belakangan, sekelompok besar orang datang lebih banyak berperan di daerah ini hingga akhirnya dimasukkan sebagai bagian dari Kerajaan Langkasuka.

Yaitu sekitar abad ke-9 umat Buddha, setelah kurang lebih 100 tahun, putra Raja Langkasuka datang ke tempat ini dan terkesan. Oleh karena itu berganti nama baru menjadi Ptai Ining dan mendirikan negara baru bernama Negara Ptai Ining hingga banyak pedagang datang untuk berdagang baik orang Cina maupun Arab, tetapi orang Arab menyebut tempat ini Fatoni, sehingga ada yang menyebut tanah ini. Di masa lalu, Kerajaan Pattani mempraktikkan agama Buddha Mahayana. Namun pada abad ke-21, ia mulai masuk Islam. Dalam beberapa periode, kerajaan diperluas mencakup Kelantan dan Terengganu. tengah malaysia Namun setelah berakhirnya dinasti Si Wangsa Kerajaan Pattani mulai mengalami kemunduran. ⁸Hingga jatuh ke tangan Siam pada tahun 2329 dan menjadi koloni hingga tahun 2445, digabung menjadi bagian dari Siam.

e. Sistem rejimen Thailand

Thailand di dalam sistem demokrasi. Raja adalah kepala negara-negara. Ada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Thailand telah lama menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri secara sistematis, yang mengakibatkan Thailand bersatu dan mampu

⁸ "Pattani yang Terlupakan" Sejarah Kerajaan Patani

mempertahankan kemerdekaannya hingga saat ini. Pemerintah Thailand telah menyesuaikan dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. dan selalu sejalan dengan kebutuhan bangsa. Menyebabkan cara pemerintahan di setiap periode berbeda dan Thailand mengubah rezim dari monarki absolut menjadi demokrasi dengan Raja menjadi kepala negara pada tahun itu Pada tahun 1932, ada 18 konstitusi yang merupakan hukum tertinggi yang mengatur negara. Dan saat ini adalah konstitusi Kerajaan Thailand zaman 2014. Thailand memiliki satu negara bagian yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki Daya dibagi menjadi 3 bagian:

- Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Menegakkan atau mengatur negara oleh pemerintah yang merupakan kekuatan dan tugas Perdana Menteri dan kabinet
- Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan hukum dari Pengadilan digunakan untuk memutuskan kasus tersebut Pengadilan dibagi menjadi 3 tingkatan: Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
- Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. dan memantau pekerjaan pemerintah

2. Sejarah tiga provinsi perbatasan Thailand selatan

Kerajaan Thailand terdiri dari tanah yang merupakan negara bagian dan provinsi kuno di masa lalu, bergabung bersama untuk membentuk negara modern dengan batas yang pasti. tetapi karena kekuatan dari orang tua di setiap zaman serta interaksi dengan negara tetangga dan upaya berbagai kota lain. yang dulu mandiri membuat perkembangan Kerajaan Thailand di setiap era Pada masa kita harus terus menghadapi kekuatan baik di dalam maupun di luar kerajaan, bahkan setelah era ekspansi kolonial bangsa-bangsa barat, ada

kesepakatan yang jelas tentang status berbagai negara bagian Kerajaan Thailand. terutama dalam kasus tiga provinsi perbatasan selatan dengan bersikap terbuka dan pengakuan Memang, mereka adalah bagian dari sejarah Kerajaan Thailand. Itu lebih baik daripada menyangkal atau menutup. kesempatan belajar Hal ini tidak hanya menciptakan pandangan sempit warga Thailand, tetapi juga membuka peluang bagi berbagai kelompok aktivis untuk menggunakan kelemahan tersebut untuk memperluas kepentingan politik mereka baik di dalam maupun di luar negeri. dalam dan luar negeri Hingga kekuatan konflik menjadi lebih parah dari yang bisa dilakukan oleh rakyat Thailand sendiri dapat disembuhkan di masa depan.⁹

Akhir-akhir dalam ini, negara maupun gerakan telah memilih untuk menggunakan bagian-bagian sejarah tertentu. untuk kepentingan pihak tertentu oleh pemerintah, mengacu pada hilangnya tanah untuk meningkatkan kesadaran rakyat Thailand di seluruh negeri harga tanah sementara gerakan pemberontak mengacu pada negara Pattani dan reklamasi Kemerdekaan Melayu Pattani. Penggunaan sejarah semacam itu mengarah pada konfrontasi dan Konflik meningkat dengan keras dan cepat. sampai beberapa orang Thailand berkata "Tidak dibutuhkan Kenali semua sejarahnya karena sekarang ini Thailand." Sekaligus gerakan kemudian menerbitkan pesan "Orang Si Yae (*Siam*) menginvasi orang Melayu Usir mereka." Interaksi dan kombinasi orang Thailand, 2 contoh ini saja sudah lebih dari cukup untuk mengatakannya Konflik rakyat Thailand telah meluas.

Keluar lebih dari yang diharapkan Menjelaskan kebenaran sejarah Meski tidak ada jaminan, konflik akan segera diselesaikan. Tapi itu harus segera dilakukan agar masyarakat Thailand memahami sejarahnya negara sendiri dengan benar memiliki pandangan yang lebih terbuka dan

⁹ <https://paweena8840.wordpress.com> Sejarah tiga provinsi perbatasan selatan

tidak boleh menimbulkan konflik di masa lalu Atau saat ini untuk memperpanjang hasilnya menjadi lebih buruk Kalau tidak, itu sama dengan orang Thailand di zaman modern. Telah menciptakan sejarah yang lebih buruk dari masa lalu untuk generasi mendatang Di sisi lain, dari segi peradaban dan geopolitik, sejarah menciptakan peradaban yang membanggakan. pada leluhur orang-orang dari tiga provinsi perbatasan selatan Oleh karena itu, harus didorong untuk berpromosi Mempelajari dan menyebarluaskan ilmu kepada masyarakat untuk mengetahui hal-hal baik yang menjadi warisan peradaban.

Sampai hari ini lebih dari sebelumnya. dan hubungan antara negara Thailand dan negara Pattani di masa lalu Negara Thailand atau Siam disini adalah Kerajaan Siam yang berpusat di Ayutthaya dan Bangkok di wilayah lembah sungai Chao Phraya. Negara Pattani adalah bentuk hubungan struktural dan perebutan kekuasaan di wilayah semenanjung Melayu antara dua unit politik yang telah berlangsung paling lama didokumentasikan setidaknya sejak abad ke-16. Hubungan antara dua kekuatan politik hingga sebelum abad ke-19 terlihat jelas dalam dua hal dan Penghormatan dan perang antara satu sama lain memberikan penghormatan kepada pihak Pattani dan perang adalah Sebagian besar orang Siam datang berperang untuk menyerang Pattani.

Inilah ciri khusus hubungan Pattani dan Siam sebelum abad ke-19 yang berakhir dengan hilangnya kekuasaan Kesultanan Pattani kepada negara Siam pada tahun 1785. Setelah itu, hubungan berubah menjadi pemerintahan kota luar dengan pusat kota Bangkok. Namun pertempuran dalam bentuk perang dan pemberontakan masih menjadi pola hubungan yang terjadi hingga integrasi negara Thailand menjadi negara-bangsa modern pada masa pemerintahan Raja Rama V, hubungan kekuasaan berubah. dan sejarah hubungan negara Siam dengan negara Pattani dalam kurun waktu yang panjang seperti yang termuat dalam legenda Patani

(*Hikayat Patani*), konflik yang terjadi di wilayah tiga provinsi perbatasan selatan terkait dengan berbagai elemen spasial Dibagi menjadi 7 aspek yang terdiri dari ini:

- 1) Politik dan pemerintahan Ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat di daerah tersebut. Faktor-faktor tersebut diangkat sebagai isu politik yang kondusif untuk menimbulkan konflik hingga akhirnya berubah menjadi kekerasan.
- 2) Agama dan kepercayaan Sementara agama bukanlah penyebab langsung dari konflik di wilayah tersebut, diyakini bahwa Islam telah digunakan untuk membenarkan tindakannya. Para pemimpin pemberontak di daerah itu.
- 3) Ekonomi, kemiskinan dan hak untuk mengakses sumber daya alam masyarakat setempat.
- 4) Aspek sosial dan budaya Pemerintah masih minim pengetahuan dan pemahaman tentang identitas muslim masyarakat di daerah tersebut, sehingga menjadi penindasan terhadap identitas muslim mereka.
- 5) Dari segi pendidikan, penyebab upaya pemerintah untuk mengontrol pengelolaan pendidikan lembaga pondok menjadi penyebab lain yang menyebabkan masyarakat di daerah menjadi paranoid dan menolak sistem pendidikan negara Thailand secara default.
- 6) Keadilan Disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia dan hak asasi manusia dari banyak kasus. peristiwa kekerasan yang terjadi.
- 7) sejarah Masalah keresahan sebagian disebabkan oleh persoalan sejarah yang masih digunakan untuk menimbulkan perasaan. dan masing-masing pihak memiliki perspektif yang berbedakan.

Tab4.3.Tiga provinsi di selatan thailand



a. politik pemerintah tiga provinsi perbatasan selatan

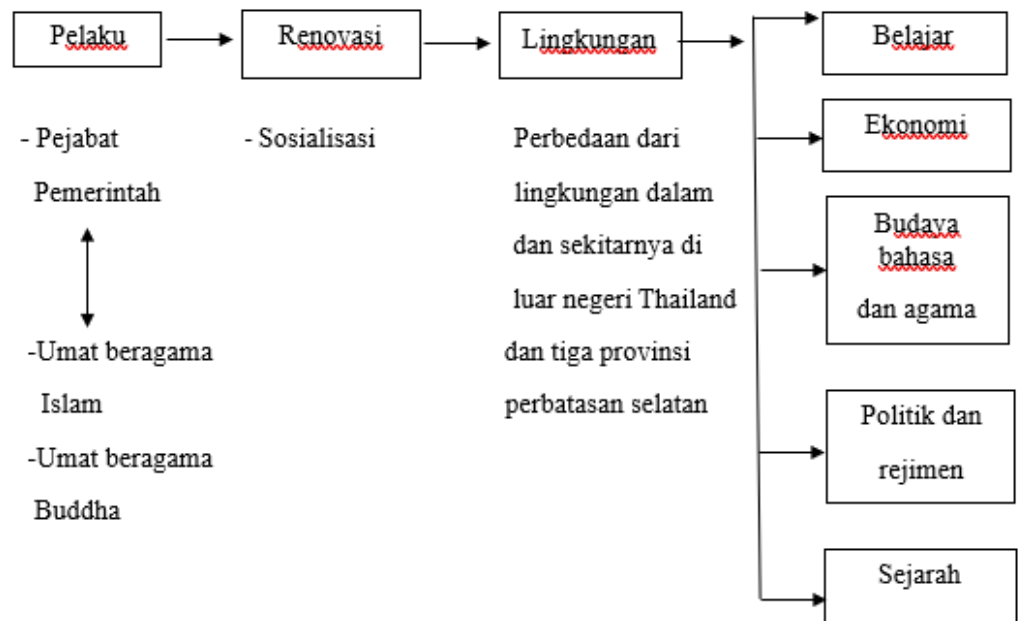
Pemerintahan dari sejarah 3 provinsi perbatasan selatan dan sebagian Satun dan Songkhla adalah Kerajaan Pattani. warisan dari kerajaan Langkasuka Kerajaan Pattani Semula, Raja Melayu Pattani dipusatkan. yang mengatur hubungan dengan Thailand atau Siam untuk waktu yang lama Pengaruh Thailand menyebar ke wilayah Pattani sejak abad ke-19 Buddha selama periode Sukhothai. Pattani telah diperintah oleh banyak raja dari generasi ke generasi. dan telah berkembang selama ratusan tahun. yang merupakan provinsi di bawah kekuasaan Thailand Yang Mulia Raja Buddha (*Yodfa Chulalok*) memberikan wewenang kepada Krom Prajadhipok Bowon Maha Sura Sihanat yang merupakan saudara kerajaan saat itu memimpin tentara Thailand melawan dan proses peradilan bagi rakyat berlangsung secara resmi dan menegakkan hukum tentang keadilan dan sebab-sebab yang menimbulkan rasa perpecahan di antara orang-orang di daerah tersebut atau ketimpangan yang adil agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap proses remedial pemerintah yang mencakup semua golongan dan tingkatan dengan

mengembangkan sistem dan memperbaiki proses remedial agar transparan. dan provinsi, organisasi pemerintah daerah Masyarakat sipil, sektor publik dan semua kelompok pemangku kepentingan Berkontribusi lebih banyak pengembangan dan perbaikan.

Dengan menyediakan mekanisme pengelolaan pemerintahan yang potensial dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam setiap langkah penyelesaian masalah dan pembangunan daerah. dan ikut serta dalam proses peradilan Merumuskan strategi dan melaksanakan rencana dan proyek di bawah kebijakan pengelolaan tiga provinsi perbatasan selatan.¹⁰

b. Geografi masyarakat Thailand di Selatan

Tabel4. 4. Geografi masyarakat sebagai berikut:



Masyarakat di tiga provinsi perbatasan selatan Muslim Thailand di provinsi perbatasan selatan menjadikan orang Melayu Muslim di

¹⁰ Surin Pitsuwan (2000) Pemimpin Konflik dan Kekerasan: Situasi di Provinsi Perbatasan. Wilayah selatan Rumilae, 21(2), 37-46.

daerah tersebut yang memilih untuk mendefinisikan identitas mereka berbeda dari orang Thailand dalam bentuk negara Karena sementara otoritas menggunakan istilah untuk menyebut kelompok ini Muslim Thailand, yaitu orang-orang berkebangsaan Thailand dan ras Thailand yang Islam Tapi Muslim di provinsi perbatasan selatan menyebut diri mereka "Melayu", yang berarti keturunan Melayu. Etnis Melayu/Kebangsaan dan Muslim. Akan menerima untuk menjadi orang berkebangsaan (*Ras*) Thailand atau pergi belajar saja. Pemerintah mencoba mengaturnya dari pemahaman. Orang muslim Thailand keturunan Melayu melihat bahwa orang Thailand berasal dari kata Siam (*Siam*)¹¹. dan Mengacu pada orang yang mempraktikkan agama Buddha. dan mengerti bahasa Thailand adalah bahasa agama Buddha, jadi itu adalah salah satu alasannya yang membuat beberapa Muslim di provinsi perbatasan selatan dan hidup berdampingan dalam masyarakat dengan damai Orang-orang dalam masyarakat harus memiliki pengetahuan. Tanpa ilmu akan terjadi perpecahan karena tidak ada saling pengertian. Dan pengetahuan harus berjalan seiring dengan penerimaan dan keterbukaan. Kedua hal ini merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh manusia dalam masyarakat.

Orang Kristen melihat kebersamaan dengan orang lain sebagai hal yang indah. Setiap orang tidak dilahirkan untuk mandiri atau sendirian. manusia itu berbeda beragam secara etnis multikultural Itu karena manusia harus belajar menjadi satu. Artinya, manusia harus belajar untuk hidup bersama secara damai di bawah perbedaan mereka. Di mana Kristen, Muslim, dan Budha dapat hidup bersama. karena lebih paham Mungkin masih ada beberapa konflik, tetapi bukan kekerasan. Masalah yang muncul dari perbedaan tersebut

¹¹ George Ritzer. (1992). Sociological theory. San Francisco: McGraw-Hill. Jonathan H. Turner. (1986). The Structure of sociological theory. Chicago, Illinois: The Dorsey

adalah bahwa akar penyebabnya bukanlah agama melainkan etnis Asilat. Dan umat Buddha di provinsi Pattani mampu bekerja dan mampu bergaul dengan rekan-rekan yang berbeda agama, karena dalam pekerjaan itu, setiap orang tidak dipisahkan dan menghormati keyakinan pribadi masing-masing orang, tetapi pengalaman umat Buddha juga menghadapi masalah koeksistensi di bawah ini.

Masyarakat multicultural. Tetapi masalah seperti itu tidak menimbulkan banyak masalah karena kebanyakan orang kafir lebih banyak gangguan verbal. Tidak ada tindakan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa maupun harta benda, sedangkan untuk upacara keagamaan umat Kristiani menggunakan alat musik dalam melaksanakan upacara yang dapat mengganggu warga desa atau masyarakat sekitar. Tapi orang bukan Yahudi bisa mengerti dan hidup bersama. dan sejarah Selatan pada awalnya Antara abad ke-7 dan ke-18 Buddha, ini adalah kisah migrasi ras manusia dan aliran peradaban dari luar. Terutama dari India, Cina, Jawa, Mon, Khmer dan Arab untuk berbaur dengan budaya tradisional di selatan. Hingga tanah di selatan bercirikan melting pot antara budaya dan ras manusia.

Beragam kepercayaan, adat istiadat, sistem dan lembaga sosial, politik, pemerintahan dan budaya, dan kekuasaan politik jatuh ke tangan beberapa keluarga, yaitu keluarga Na Nakhon, Na Songkhla, Rattanadilok Na Phuket, keluarga Sriyapai Na Phatthalung, dll. Tahan posisi gubernur dan departemen politik di kota-kota besar. Hanya beberapa kota saja Nakhon Si Thammarat, Songkhla, Phatthalung, Phuket, Phang Nga, Takua Pa, Trang, Chumphon dan Chaiya. dari monopoli melakukan pajak dan menggunakan tenaga kerja proletar Sistem pemerintahan masih dipisahkan menjadi kota-kota. mandiri Dan ada banyak kota yang bermusuhan seperti Nakhon Si Thammarat dan Songkhla Songkhla dan Pattani dan distrik pantai barat, dll.

Orang dibagi menjadi beberapa kelompok menurut ras dan domisili. Ada landasan untuk mengontrol secara dekat. Ada perbedaan sosial yang sangat besar antara para penguasa. Politbüro yang merupakan kelas “bangsawan” karena merupakan kelas elite yang hidup dari buruh dan pajak dari kelas “proletar” dan “budak”, sistem ekonominya masih tertinggal. Sebagian besar dari mereka masih memiliki produksi subsisten. Memang tanah yang merupakan faktor produksi yang penting jumlahnya melimpah. Perubahan ekonomi besar terjadi pada akhir era ini. Keadaan seperti itu menyebabkan kondisi masyarakat Thailand secara keseluruhan dan Selatan terpecah belah. dimanfaatkan oleh kalangan elit Oleh karena itu, masyarakat Thailand pada akhir Abad Pertengahan jatuh ke dalam keadaan merosot. dan perlu segera dikembangkan Tetapi beruntung bahwa perkembangan masyarakat modern Artinya, "kapitalisme" dimulai pada Abad Pertengahan dan terus berkembang di Selatan modern.

Sejarawan umumnya menerima bahwa masyarakat Thailand telah mulai berkembang menjadi masyarakat baru. Masyarakat kapitalis dan kondisi politik, administrasi, ekonomi, masyarakat dan budaya Selatan telah beradaptasi dengan bentuk baru. Sangat berbeda dengan Abad Pertengahan atau periode Feodal, perubahan itu merupakan evolusi alami masyarakat Thailand yang terus-menerus beradaptasi daripada revolusioner. Geopolitik tiga provinsi perbatasan, yaitu Pattani. Yala dan Narathiwat Sebelum berdirinya sebuah provinsi pada tahun 1933, tanah ini melewati peradaban. untuk banyak era sebagai berikut:

- 1) prasejarah Tiga provinsi perbatasan selatan memiliki bukti tempat tinggal Penduduk kota ini sejak sebelum 3000 tahun yang lalu secara kolektif disebut Orang Asli (*Orang Asli*),

yang meliputi Nigrito (*Nigrito*) seperti Sakai dan Semang. Ada juga Senoi (*Senoi*).) Suku Mongoloid Selatan, termasuk suku leluhur orang Siam dan Melayu, telah hidup selama ribuan tahun.

- 2) Pemerintahan 7 kota sejak 1808 telah dibagi menjadi 7 kota: Pattani, Nong Chik, Yaring, Yala, Raman, Rangae dan Saiburi. Setiap kota memiliki kota yang ditunjuk oleh pemerintah Siam di Bangkok. menjadi orang tua dengan prinsip yang dimiliki setiap kota Kebanyakan Muslim memiliki penguasa Islam. Kota mana yang memiliki umat Buddha terbanyak? untuk kota Buddha Namun dalam praktiknya kota ini berulang kali menghadapi masalah dengan pemerintah. Siam termasuk orang di berbagai kota. Terjadi banyak konflik akibat pemerintahan, sehingga bentuk pemerintahan ini harus dihapuskan pada tahun 1902. Saat ini masih terdapat istana yang dulunya merupakan kediaman gubernur. Sebuah pusaka yang akan diwariskan kepada anak cucu Tetapi beberapa tempat dan ditinggalkan seiring waktu.
- 3) Selama tiga provinsi perbatasan selatan pada tahun 1931, pemerintah mengumumkan pembatalan Provinsi Pattani. dan pembubaran Provinsi Sai Buri direduksi menjadi sebuah distrik di Provinsi Pattani Secara keseluruhan, tiga provinsi. Menjadi pemerintahan provinsi Nakhon Si Thammarat kemudian pada tahun 2476, pemerintah mengeluarkan surat perintah kerajaan. Tata cara tentang peraturan daerah provinsi membagi pemerintahan menjadi provinsi dan kabupaten Akibatnya, provinsi perbatasan selatan Pattani, Yala, dan Narathiwat ditetapkan sebagai provinsi dalam sistem tersebut. Pemerintah provinsi dan

gubernur provinsi menjadi administrator sejak tahun 1933 sampai sekarang.

Dari rangkaian perkembangan tersebut di atas, terlihat bahwa tiga provinsi perbatasan selatan telah makmur hingga ke tingkat yang disebut kerajaan sejak sebelum masa Sukhothai, yang dianggap sebagai ibu kota. yang pertama dari Kerajaan Thailand Belakangan, kekuatan ibu kota Sukhothai menyebar ke selatan. Melanjutkan ke periode Ayutthaya dan Rattanakosin oleh setiap periode hubungan antara Siam atau negara kekuatan masing-masing pihak membuat sejarah Thailand terkait dengan sejarah Pattani dan Pattani tentang negara Thailand adalah ambigu dan tidak jelas Oleh karena itu, disajikan urutan perkembangan geopolitik. Semoga membantu untuk memahami lebih jelas dan penting dalam analisis adalah sistem budaya. dengan menunjukkan itu Pendidikan sejarah Thailand

Thailand dan Pattani atau tiga provinsi perbatasan selatan berbeda menurut kekuatan politik dan dan pengetahuan sejarah dari tiga provinsi perbatasan selatan dengan cara hidup yang berbeda dan agama yang berbeda Akibatnya, perlakuan satu sama lain mengarah pada keadaan keterasingan antara mekanisme “kekuasaan negara” dan rakyat “Muslim” yang mengakibatkan ketidakpercayaan satu sama lain dan Perselisihan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah Ini mempengaruhi interaksi negatif dan ketika kebijakan pembangunan negara dalam berbagai dimensi termasuk politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, yang tidak sesuai dengan budaya, bahasa, dan agama umat Islam, mau tidak mau mengakibatkan konflik berkepanjangan dan masalah kekerasan yang menembus setiap sistem dengan budaya. Penulis merangkum seperti Gambar 3 sebagai berikut:

c. Jumlah Penduduk agama Islam dan agama Buddha

Penduduk di tiga provinsi perbatasan selatan terdiri dari Provinsi Pattani, Provinsi Yala dan Provinsi Narathiwat, berjumlah 33 distrik, seluas 10.927 kilometer persegi, berpenduduk 1.748.682 jiwa, 1.386.880 Muslim (80%), 351.367 Buddha (20%) dan 208.076 etnis Melayu (85,96%). Thailand 30.597 orang (12,64%), data tersebut menjadi bukti bahwa pada abad ke-10 Dalam satu tahun terakhir, struktur penduduk di tiga provinsi perbatasan selatan hanya mengalami sedikit perubahan. Sedangkan dari tahun 1990 hingga 2000, selama 10 tahun terakhir, penduduk Thailand yang beragama Buddha mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan penduduk Muslim.¹²

Di Thailand, etnis Melayu Muslim memang merupakan kelompok minoritas. Menurut sensus 1979, jumlah mereka adalah 977.282 jiwa atau 2,84% dari seluruh penduduk Thailand yang sekitar 45 juta jiwa.¹⁹ Dan ada sekitar enam juta Muslim di Thailand pada tahun 1982. Namun angka resmi jauh lebih kecil. Angka resmi hanya memberikan presentasi seluruh Muslim dengan penduduk sekitar empat persen, padahal angka yang mungkin lebih 12%. Sebenarnya hal ini merupakan bagian dari usaha pemerintah Thai untuk mengurangi pentingnya penduduk Muslim. Muslim hidup di seluruh Thailand, tetapi ada tiga daerah pemusatan Muslim: selatan, dari perbatasan Malaysia sampai Genting Tanah Kra (*Isthmus of Kra*); utara, di daerah Chiang Rai; dan wilayah ibukota.¹³

Wilayah selatan, dulu bukan bagian dari Thailand. Sebenarnya Semenanjung Malaya berpenduduk Melayu yang dikelola dalam negaranegara kecil. Orang-orang Melayu ini memeluk Islam sepanjang abad lima belas, sebagaimana halnya dilakukan oleh

¹² Surin Pitsuwan, Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani,

¹³ Moeflich Hasbullah, Asia Tenggara Konsentrasi Baru: Kebangkitan Islam,

hampir semua orang Melayu lainnya. Sejak abad empat belas, Thailand memulai serangan dan penaklukan Semenanjung Malaya dan memuncak pada 1767 M. dengan penaklukan semua negara Muslim sampai ke Ligor (*Nachom Sri Thammarat*), jadi memasukan negara-negara Muslim Jays (*Chaiya*), Grahi (*Surat-Tsani*) dan Ligor dalam imperium Thai. Dari Ligor arang Thai memperluas penaklukannya ke selatan menaklukkan lebih banyak orang Muslim, seperti Bedelug (*Pathalung*), Senggora (*Songkhala*), dan Sentul (*Satun*).

Dari jumlah enam juta Muslim di Thailand pada 1982 sekitar empat juta adalah Muslim Melayu yang hidup di provinsi-provinsi selatan. Muslim di Bangkok sekitar 800.000 orang, keturunan para tawanan yang dibawah dari negara-negara Melayu. Bahwa 5.250.000 Muslim di Thailand pada 1976. Muslim merupakan separuh penduduk wilayah selatan, satu dari empat wilayah kerajaan. Di wilayah ini (luas daerahnya 72.961 kilometer persegi),sebenarnya Muslim merupakan minoritas di provinsi-provinsi Naratiwat, Yala, Pattani, Satun, Songkhla, dan Krabi.

Tab4 .5.Wilayah Pattani

Provinsi	Luas (km2)	Muslim (%)	Buddhis (%)
Pattani	2.109 km2	77,75%	22,22%
Yala	4.716 km2	60,00%	40,00%
Narathiwat	4.227 km2	80,00%	20,00%
Satun	2.669 km2	70,00%	30,00%
Total	13.721 km2	71,94%	28,06%

d. Biografi Hubungan antara umat Buddha dan umat Muslim di tiga provinsi perbatasan Thailand selatan

Hubungan antara umat Buddha Thailand dan Muslim di tiga provinsi paling selatan adalah Hal ini sebagian besar tercermin dalam hubungan antara pegawai negeri dan Muslim. Ada sikap tidak menghargai satu sama lain dan kurang percaya satu sama lain.¹⁴

Umat Buddha dan Muslim adalah orang yang berbeda. kelompok atau komunitas yang terpisah Beberapa dari mereka dicirikan oleh komunitas campuran. atau hidup bersama Dengan demikian, umat Buddha dan Muslim seringkali tidak memiliki banyak aktivitas bersama, beberapa komunitas Muslim berada sangat jauh dari komunitas Buddhis.

Untuk Umat Buddha di tiga provinsi perbatasan selatan juga dapat dibagi menjadi 2 golongan seperti Umat Buddha di daerah itu sendiri. dan umat Buddha yang bermigrasi dari berbagai daerah dan jarang memandang rendah satu sama lain karena umat Buddha di daerah itu dikenal Selalu akrab dengan orang-orang dan peristiwa di daerah ini. mampu beradaptasi satu sama lain Umat Buddha ini memahami cara hidup umat Islam dan kurang lebih mampu berbicara bahasa Jawi (*Melayu*). Oleh karena itu, jarang ada masalah dalam hidup berdampingan dan bekerja sama dengan umat Islam.

3. Sejarah islam di pattani Thailand selatan

Patani yang penulis maksud dalam bahasan ini bukanlah suatu propinsi (*Chan gwad Pattani*) sebagaimana yang terwujud dalam peta negara Thailand sekarang, tetapi Patani di sini adalah sebuah Negeri Kerajaan Melayu yang pernah berdaulat pada masa dahulu, memiliki

¹⁴ Pitsuan, Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani

daerah terdiri dari wilayah propinsi Naratiwat, Yala, Pattani, Setun dan sebagai dari pada propinsi Songkhla yaitu distrik Tibor, Canak dan Sebayor. Wilayah -wilayah Negeri Kerajaan Melayu Patani tersebut sejak 1902 M, telah dihapus dan diakui oleh dunia Internasional masuk menjadi wilayah negara Thailand sampai sekarang¹⁵.

Awal hubungan antara Kerajaan Thailand dan kerajaan Pattani didasarkan pada kerangka sistem sungai di mana-pemerintah lemah dan negara mengakui supremasi raja Thailand. Dalam prakteknya, mereka mengirim upeti secara berkala dalam bentuk simbolis dari perak dan emas bunga (*bunga mas*) ke pengadilan Thailand. Hubungan kekuasaan tersebut berteori sebagai sistem mandala dimana kekuatan paling kuat di sekitar pusat dan surut yang lebih jauh itu adalah dari pusat. Ini berarti bahwa secara historis suatu negara bawahan seperti Pattani memiliki beberapa otonomi dalam pemerintahan sendiri sambil mempertahankan status anak sungai dengan Siam.¹⁶

Dari abad kelima belas, ketika elit selatan wilayah ini masuk Islam, keinginan untuk memasukkan negara-negara selatan ke dalam Kerajaan Thailand telah konstan. Pattani adalah pelabuhan penting untuk perdagangan dan perdagangan dengan dunia luar. Sejarah awal penaklukan dari Melayu Muslim di bawah sistem pemerintahan karena bertujuan untuk mengamankan kerajaan Pattani sebagai bangsa jajahan atau bawahan dari Siam untuk memastikan itu bisa berfungsi sebagai pelabuhan masuk untuk perdagangan luar negeri raja-raja Siam.

Secara historis, ada dua jenis kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand atas wilayah Pattani. Salah satunya adalah aturan langsung dan aturan tidak langsung. Aturan yang terlibat langsung mengirim pejabat Thailand untuk memerintah kerajaan Muslim; orang

¹⁵ https://naamchoop.com/know_detail.php?=sejarah

Siam dikenakan pada kelompok penguasa lokal dan penduduk. Hasil dari awal perlawanan dan ketidakpuasan para penguasa Pattani dan orang-orang yang cenderung untuk memungkinkan peran yang lebih dan kepentingan dengan elit Muslim lokal dan dengan demikian memberikan persyaratan lagi hubungan damai antara kedua belah pihak.¹⁷

Dengan periode Ayutthaya ke periode Bangkok awal, para penguasa Thailand mengadopsi kebijakan memecah belah dan memerintah dalam berurusan dengan negara-negara Muslim di Selatan. Setelah banyak pemberontakan dari negara-negara Muslim, Bangkok dibagi menjadi kotakota kecil dan melimpahkan kewenangan atas negara-negara pengikut di Selatan ke kota Thai-Buddha utama di daerah, yang bertindak atas nama Bangkok. Songkhla dan Nakhonsrithammarat adalah kota yang dipilih. Pengaturan ini mencerminkan keterbatasan birokrasi Bangkok dan keinginan untuk menguasai negara-negara jajahan jauh dengan cara politik untuk menciptakan berbagai kelompok yang kuat di kalangan elit lokal sehingga tak seorang elit cukup kuat untuk membuat pemberontakan berhasil melawan Bangkok. Kebijakan tersebut membagi dan aturan terbukti efektif meskipun ketidakefisienan birokrasi Siam.

Negeri Patani mempunyai sejarah yang panjang ia merukan sebuah kerajaan Melayu tua pengaruh India-Langka Suka. Buku Hikayat Patani menjelaskan bahwa pendiri Negeri Patani ialah Phya Tu Nakpa. Beliau raja terakhir dari kerajaan dinasti Langka Suka, beliau putra dari Phya Tukrab Mahajana yang memerintah di suatu tempat yang bernama 'Kota Mahligai'. Setelah Phya Tu Nakpa pindah ke Patani (Patani berasal dari kata Patani ini /Pak tani), Patani menjadi lebih ramai dan oleh karena lokasi yang strategis, Patani ini menjadi makmur dan

¹⁷ Aphornsuvan, History and Politics of the Muslim in Thailand, h 12

mewah serta terdapat sebuah bangunan megah Istana Kerajaan yang terletak di daerah Kresik sekarang.

Sejarah kerajaan Ayutthaya mencatat bahwa tahun 1564 ketika Ayutthaya kerajaan terpaksa menyerah ke Burma, sebuah unit pasukan Melayu dari Pattani, yang diminta untuk datang untuk membantu Ayutthaya terhadap Birma, melihat kesempatan dan memutuskan untuk berbalik melawan raja Ayutthaya itu dengan mengelola merebut istana untuk sementara waktu. Raja dievakuasi dari istananya sebelum mencoba kemudian untuk mengusir pemberontak Melayu keluar dari Ayutthaya. Pemberontakan lain terjadi antara 1630 dan 1633 di bawah Raja Prasat Thong, dan tawaran terakhir pada tahun 1767, setelah karung Ayutthaya oleh Burma.

Dimulai pada 1785 di bawah Raja Rama I, Pattani telah dimasukkan ke dalam bagian integral dari Kerajaan sebagai akibat dari ekspansi ke arah selatan dari Bangkok. Selain Kedah dan dependensinya, Bangkok juga ditambahkan ke dua negara Kerajaan jajahan baru, Kelantan dan Trengganu. Pemberontakan gagal terjadi di 1789-1791 setelah itu raja dari Patani ditangkap dan dipecat. Pemberontakan lain terjadi pada tahun 1808, Pattani dibagi menjadi tujuh Muang yang lebih kecil atau provinsi: Saiburi, Pattani, Nongchik, Yala, Yaring, Ra-ngae, dan Rahman. Pada saat ini, raja dari Pattaniberada di bawah pengawasan ketat dekat dan Bangkok.

Namun demikian, 'memecah belah dan memerintah' kebijakan tidak berhasil dalam membuat wilayah Pattani menjadi negara patuh di bawah pemerintahan Thailand. Selama abad kesembilan belas, tujuh provinsi lagi berusaha untuk memberontak terhadap otoritas Thailand meningkat atas wilayah tersebut.

Walaupun ada pemberontakan dan perlawanan dari penguasa Pattani di periode Ayutthaya dan Bangkok, mereka konflik antara kelompok istimewa dan kuat dari kedua belah pihak atas kontrol tenaga kerja dan kekayaan di daerah tersebut. Tidak sampai sejarah modern negara-bangsa tidak konflik mulai datang dari rasa rakyat identifikasi mereka agama dan budaya. Dengan munculnya nasionalisme Thailand dan ekspansionisme selama Perang Dunia II, Melayu-Muslim di Selatan yang mendalam menjadi sasaran kebijakan “Thailand-icization” Bangkok. Sejak saat itu konflik daerah kuno berubah menjadi gerakan separatis yang melibatkan semua Muslim di daerah itu, tidak hanya kelas elit.¹⁸

Melayu-Muslim telah menjadi warga negara Thailand, bukan karenapilihan mereka sendiri, tetapi oleh kekuatan sadar dan paksaan oleh pemerintah Thailand dalam serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk menegakkan Thailand-icization provinsi Melayu, 1902-1944. Sebagai hasil dari reformasi administrasi di bawah Raja Chulalongkorn (r. 1868-1910) di tahun 1890-an, kerajaan-kerajaan tradisional, yang menikmati status otonom, telah berubah menjadi propinsi di bawah kekuasaan langsung dari Bangkok. Dalam kasus Pattani, reformasi dimulai pada tahun 1902 dan selesai pada

Tahun 1906, bertepatan dengan kesepakatan akhir dengan Inggris, yang meratifikasi batas-batas antara Siam dan British Malaya. Dengan reformasi itu, raja dan royalti di Pattani telah dihapus dari posisi pengaruh dan bunga dan digantikan oleh birokrat Thailand dari Bangkok. Penggabungan daerah Patani Greater (*lebih besar*) ke dalam sistem administrasi Thailand pada tahun 1902 tidak hanya tindakan politik sentralisasi kekuasaan oleh Bangkok, tapi apa yang lebih bermasalah dan

¹⁸ Ahmad umar capaian, politik dan perjuangan masyarakat islam selatan Thailand 1902-2002, (malaysia, ukm, 2000)

menghancurkan adalah intervensi ke dasar masyarakat Islam dengan praktek Thai-Buddhis.

Yang paling penting adalah penghapusan Syariah (*hukum Islam*) dan adat Melayu (*hukum adat Melayu*), yang merupakan dasar praktek Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum penggabungan wilayah Pattani Raya, daerah itu diperintah oleh raja Melayu (*raja*). Meskipun berada di bawah kekuasaan raja Pattani Thailand, raja masih memerintah berdasarkan Syariah dan Adat Melayu. Lembaga-lembaga penting Islam adalah masjid, atau masjid di kadi Thailand, dan pondok (*sekolah agama*). Masjid ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi serta sebagai tempat praktek keagamaan dan balai desa. pondok ini merupakan pusat belajar bagi masyarakat. Kedua lembaga sangat penting bagi keberadaan dan kesejahteraan bagi semua umat Islam. Pelaksanaan sentralisasi administrasi di wilayah ini pasti campur tangan dan diganti aturan lokal dan adat dengan peraturan pusat dan peraturan. Segera setelah itu, ruang provinsi menggantikan masjid lama, sebagai arti dari kedatangan pemisahan agama dari politik.

Penghapusan Syariah datang sebagai hasil dari pelaksanaan undang-undang Thailand di semua daerah di bawah kedaulatan pemerintah pusat absolut. Reformasi hukum yang diperlukan sebelumnya bahwa hukum Islam yang berlaku di seluruh wilayah muslim diganti dengan hukum sekuler Thailand, kecuali untuk kasus-kasus keluarga dan warisan. Bahkan dalam kasus hukum keluarga dan warisan, keputusan hakim Muslim belum final sampai telah disetujui oleh hakim Thailand. Itu berarti hakim muslim di pengadilan reformasi, tidak seperti sebelumnya praktek, memiliki kekuatan sama sekali. Dan ketika kasus naik ke pengadilan tinggi, mereka harus menerima keputusan oleh seorang hakim Thailand yang bukan muslim. Ini terhadap kepercayaan Islam dan praktik.

Dari penggabungan awal Greater Pattani Daerah pada tahun 1902, wilayah penting yang menjadi perhatian besar bagi negara Thailand itu di bidang pendidikan, yang dianggap salah satu sarana yang diperlukan untuk mencapai modernisasi. Di bagian lain Thailand, reformasi pendidikan dilakukan oleh para biksu Buddha lokal dan kuil-kuil bersama dengan pejabat pemerintah pendidikan. Masyarakat Muslim memiliki sistem mereka sendiri dan bahasa pengantar. Mereka menggunakan bahasa Arab Melayu atau dalam instruksi dan menulis sambil konten adalah Islam.

Ketika reformasi pendidikan datang ke masyarakat Muslim, mereka diminta untuk membaca dan menulis di Thailand dan konten itu berorientasi pada mata pelajaran sekuler dan bahkan di Buddhisme. Reaksi langsung di kalangan umat Islam adalah keengganan dalam hal mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah umum. Orang Melayu memandang UU Pendidikan sebagai "batas ketahanan". Mereka menuduh pemerintah Thailand dari "mencoba untuk membasmi bahasa Melayu membenci dan mengubah status alami dari generasi muda Melayu ke Siam."

Integrasi paksa-Melayu Muslim terus pada masa pemerintahan Raja Rama VI Vajiruvudh atau (r.1910-1925) yang berkampanye intens untuk menyatukan kerajaan Thailand bawah nasionalisme resmi. Melayu-Muslim di Pattani menimbulkan tantangan untuk ide raja Thailand esensi yang menekankan tritunggal bangsa, agama (*Buddha*) dan raja. Pemerintah mengeluarkan program pendidikan wajib Thailand untuk menanamkan rasa nasionalisme baru. Kebijakan tersebut dan praktek mempengaruhi-Muslim Melayu di Selatan karena pendidikan mereka dilakukan di masjid-masjid dan pondok. Syarat yang harus mengubah bahasa dan kurikulum untuk Thailand tidak bisa diterima. Pada tahun 1910 dan 1911, pemberontakan pecah di bawah

kepemimpinan tertentu [pemimpin agama] para haji. Pemberontakan 1922 adalah lebih mencolok karena melibatkan beberapa pemimpin agama dan kaum bangsawan Melayu termasuk mantan raja Pattani, Raja Abdul Kadir. Tujuan dari pemberontakan itu adalah kemerdekaan.

Pada tahun 1923, pemerintah Bangkok terpaksa meninjau kembali kebijakan pendidikan wajib, penetrasi birokrasi dan keterlibatan sosial, dan ekonomi-Melayu Muslim. Kebijakan revisi memerintahkan pejabat tidak melanggar agama Islam dan bukan pajak-Muslim Melayu di Pattani lebih besar dari negara-negara Melayu di bawah Inggris, dan pejabat pemerintah yang akan ditugaskan di sana harus jujur, sopan dan tegas. Untuk saat ini, elit Melayu-Muslim di wilayah tersebut menemukan bahwa pernyataan politik mereka otonomi dan hak agama terdengar oleh para pemimpin pemerintah Thailand. Meskipun kebijakan umum asimilasi budaya dan konsolidasi kekuasaan negara Thailand belum dihentikan, struktur politik yang berubah dan kondisi ekonomi di tahun 1930-an, baik di pemerintah pusat Thailand dan juga di provinsi Pattani, membawa suasana baru demokrasi dan nasionalisme dari yang untuk sesaat tampaknya memberikan elit Muslim dan penduduk beberapa harapan untuk masa depan yang lebih baik.¹⁹

Runtuhnya kerajaan Pattani sebagai suatu kelompok etnik dan berbahasa Melayu serta beragama Islam dipaksa menjadi suatu bagian yang integral dari masyarakat Thai yang berbeda secara etnik, bahasa dan agama. Penyatuan ini banyak membawa dampak politik, ekonomi maupun kultural.¹⁰ Rapuhnya Melayu Pattani di Thailand Selatan, lunturnya kekuatan politik dan hilangnya peran elit tradisional mereka menimbulkan efek melemahkan umat. Bahasa Melayu yang menjadi

¹⁹ Ibid, h 13

perekat identitas mereka dan media dalam sistem pengajaran dihapuskan karena mendapat pengawasan dari penguasa Thai.

Muslim Thailand merasa dianiaya dan di bawah tekanan pembaharuan oleh mayoritas (*misalnya, mereka dipaksa mengambil nama-nama Thai*). Sangat tidak menyenangkan di selatan dengan tidak adanya perhatian pemerintah terhadap perasaan kebangsaan (*Melayu*) dan keagamaan penduduk. Pemerintah mencoba menghancurkan sekolah-sekolah Muslim dan menggantinya dengan sekolah Thai. Pemerintah juga mencoba menghancurkan sekolah-sekolah Muslim, tidak peduli terhadap perayaan-perayaan Islam, menganiaya, menahan dan kadang-kadang malah membunuh para pemimpin agama dan politik Muslim (*antara 1973 dan 1975*), sekitar lima ratus Muslim dibunuh oleh pemerintah di selatan, dan terakhir tetapi tidak sepele, pemerintah memerintah Muslim untuk mengambil nama Thai yang non Muslim: demi menipisnya identitas Islam mereka.

4. Resolusi konflik

Konflik di Selatan Thailand telah berlaku dalam jangka masa yang panjang dan melibatkan pelbagai aktor. Aktor yang jelas ialah pihak Orang Melayu Patani dan kerajaan Thailand. Sejarah konflik di Selatan Thailand pula boleh dibahagikan kepada dua zaman iaitu zaman perjuangan para Raja Patani untuk kemerdekaan Negeri Patani, dan zaman perjuangan kumpulan elit dan rakyat Patani untuk menjaga hak-hak kepentingan Orang Melayu Patani. Bahagian berikutnya akan membincangkan sejarah konflik di Selatan Thailand secara umum sahaja. Dan negeri Melayu yang terletak di tanah Genting Kra, Thailand bagian selatan. Saat ini, daerah yang dulu disebut Patani ini telah terpecah menjadi empat provinsi yaitu Patani, Yala, Songkhla dan Narathiwat. Pada era kejayaan Sriwijaya, Patani dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang terdapat di daerah Semenanjung Melayu dan

Sumatera berada dalam kekuasaan Sriwijaya. Dari Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, sebagai jalur strategis untuk perdagangan Sriwijaya menarik pajak dari para pedagang yang lewat dan berdagang di kawasan ini.²⁰

Pada Islam sudah masuk dan mulai tersebar luas di wilayah Patani, awal masuknya Islam melalui para pedagang dari Arab, India dan Aceh. Seiring berkembangnya Islam kemudian Raja Patani Phaya Tu Nakpa masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Ismail Syah Zhilfullah fi al-Ardl, melalui kekuasaan Sultan Ismail Syah inilah awal mula gerakan islamisasi yang masif di wilayah Patani. Pada Patani ditaklukan oleh kerajaan Ayuthya, namun pendudukan Ayuthya atas Patani tidak berlangsung lama. Di Kerajaan Patani telah merdeka dan berhasil mengembangkan diri menjadi kerajaan yang besar dan maju, kemajuan ini berlangsung lama sampai pada sehingga hampir keseluruhan penduduk Patani memeluk agama Islam. Dengan tersebar luasnya Islam di Patani, maka kemudian terbentuk dua wilayah kebudayaan di kawasan tanah Genting Kra yang dibedakan oleh dua agama yaitu Islam dan Budha.²¹

Kemajuan Patani sebagai pusat perdagangan kemudian menarik para penjajah dari negari-negari Eropa, yang pada awal mulai melakukan ekspansi kolonialisasi ke wilayah Asia Tenggara. Diantaranya adalah Portugis dan Belanda yang turut meramaikan jalur perdagangan di sekitaran semenanjung Melayu terutama untuk mendapatkan hasil bumi seperti rempah-rempah dan emas yang menjadi hasil utama dari Patani. Tercatat Portugis sudah tiba di Patani tahun 1517 untuk melakukan transaksi perdagangan, kemudian pada tahun 1602 pihak Belanda juga

²⁰ Kerajaan Patani diakses dari <http://melayuonline.com/ind/history/dig/99/kerajaan-pattani>. (01/12/2018.19.05 WIB)

²¹ Kerajaan Ayuthaya merupakan kerajaan bangsa Thai (Budha) yang kemudian berubah nama menjadi Kerajaan Siam

datang dan melakukan perniagaan bahkan mendirikan pangkalannya di pelabuhan Patani. Berikutnya kemudian armada Inggris juga menjalankan kegiatan perdagangan ke wilayah Asia.²²

Zaman keemasan ini berlangsung ketika diperintah oleh empat orang Raja perempuan yaitu Raja Hijau (1584-1616), Raja Biru (1616-1624), Raja Ungu (1624-1635) dan Raja Kuning (1635-1651). Pada zaman ratu-ratu Patani sangat makmur dan kaya, selain besar dibidang ekonomi Patani juga ditopang oleh kestabilan politik dalam negeri yang membuat Kerajaan Patani dihormati dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di semenanjung Melayu.

Seiring perkembangannya, kerajaan Patani mengalami masa dekadensi secara berangsur-angsur yang disebabkan oleh gejolak politik internal kerajaan dalam perebutan kekuasaan serta adanya gesekan politik dan ekspansi wilayah oleh kerajaan Siam yang berakibat pada kemunduran kerajaan Patani. Kekalahan Patani oleh Siam terjadi pada tahun 1786 setelah mendapat serangan Phya Taksin Raja Thonburi pemimpin kerajaan Ayuthaya. Setelah kejatuhan Patani munculge jolak politik dan kekuasaan yang berdampak langsung pada kekacauan dalam negeri Patani, imbasnya adalah bidang perdagangan mengalami penurunan daya tarik. Bagi para pedagang dan saudagar yang melihat situasi internal Patani yang tidak menentu mengakibatkan mereka memindahkan perniagaan ke wilayah baru yang mulai mengalami kemajuan seperti Johor, Malaka, Aceh, dan Batavia.

Pada akhirnya wilayah Patani dapat ditaklukan secara penuh dan menyeluruh oleh kerajaan Siam pada tahun 1808 setelah Raja Patani

²² Patani secara geografis sangat strategis karena berada di pertengahan jalur lalu lintas perdagangan antara negeri Melayu dan Asia Timur dan diantara perairan Selat Malaka serta Laut Sulu dengan perairan Laut Cina Selatan. Jalur ini merupakan jalur lewatnya armada perkapalan antar bangsa yang menghubungkan tanah Arab dan India bahkan dengan benua Cina.

Datuk Pengkalan gagal dalam pemberontakan terhadap pihak Siam. Kekalahan ini menciptakan sentimen anti Siam yang terus berkembang pada periode setelah kekalahan ini. Untuk meredam konflik yang terjadi pihak Siam bereaksi dengan memberlakukan beberapa kebijakan memecah Kerajaan Melayu Patani menjadi tujuh wilayah yang dikenal dengan Boriwen Ched Hua Muang. Pada tahun 1815 atas perintah Raja Rama II, Patani terbagi menjadi tujuh kawasan negeri yang terdiri dari Patani, Nong Chik, Yaring, Saiburi, Legeh, Yala dan Raman. Setelah dipecah menjadi tujuh wilayah, lahir kebijakan transformasi mekanisme kerajaan yang dimaklumkan dengan istilah sistem “Thesaphiban” yang diterapkan pada tahun 1899. Aturan kebijakan yang cukup radikal ini berusaha menggunakan cara langsung dalam mengatur kerajaan melalui daerah perwakilan atau melalui agen pemerintah kerajaan (sistem perwakilan).²³

Dibawah sistem Thesaphiban pembagian wilayah disusun dan disatukan kedalam satu unit yang dikenal sebagai Monthon. Tiap-tiap Monthon dipimpin oleh seorang Gubernur yang bertanggungjawab kepada menteri kerajaan. Dibawah aturan ini, keistimewaan yang dimiliki oleh Raja Patani mulai berkurang dan terkikis. Kerajaan Patani yang sebelumnya masuk daerah jajahan dengan memiliki otonomi dalam hal-hal tertentu sebagai sebuah kerajaan kemudian berubah menjadi satuan administrasi yang dikendalikan oleh pemerintah pusat di Bangkok.

Kebijakan ini dikeluarkan selain untuk meredam konflik internal agar bisa mengatasi pemberontakan dan perlawanan dari muslim Patani, berkaitan erat juga dengan situasi eksternal yang terjadi pada tahun-tahun

²³ Kebijakan ini yang menjadi titik awal atau penyebab dari memudarnya otoritas Kerajaan Patani dalam mengatur kehidupan internal negerinya.

1890-an terjadi ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh para kolonial dari benua Eropa di wilayah Asia Tenggara yaitu kolonial Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol karena mereka telah menjejakan jajahannya di wilayah Asia Tenggara. Dengan melihat situasi politik regional sekitar Semenanjung Melayu demikian sehingga Kerajaan Siam mendekonstruksi dan merestrukturisasi wilayah kekuasaan mereka untuk membendung arus kolonial yang ingin menguasai wilayah semenanjung. Pihak Inggris yang telah menguasai semenanjung bagian selatan (Malaysia) tertarik dengan empat daerah strategis taklukan Kerajaan Siam yang terletak di sebelah selatan Patani yaitu Kedah, Kelantan, Trengganu dan Perlis karena koloni Inggris menilai daerah tersebut berpotensi ekonomi sebagai daerah baru yang dapat dijadikan pelabuhan dan pangkalan perang Inggris di wilayah Asia.

Untuk dapat menguasai empat wilayah tersebut secara penuh, Inggris melakukan diplomasi dengan Kerajaan Siam. Hasil dari diplomasi ini adalah Kerajaan Siam menyerahkan wilayah Kelantan, Kedah, Trengganu dan Perlis kepada kekuasaan Inggris dan Inggris mengakui kedaulatan Siam terhadap Patani dan mengembalikan segala persoalan yang menyangkut hak ekstra teritorial wilayah dan kenegaraan kepada Siam. Perjanjian inilah yang dikenal dengan Traktat Anglo-Siam tahun 1902.²⁴

a. Konflik antara Elit dan Rakyat Patani dengan Kerajaan Thailand

Para pejuang di bumi Patani bukan hanya terdiri dari kalangan raja sahaja bahkan ada juga dari kumpulan elit agama dan rakyat Patani yang sanggup berjuang untuk kepentingan umat Melayu Islam Patani.

²⁴ Paulus Rudolf Yuniarto. 2004. Integrasi Melayu Patani: Sejarah Perubahan Geopolitik dan Demografi. PSDR-LIPI. diakses dari <http://psdr.lipi.go.id/research-staff/paulus-rudolfyuniarto.html>

Contohnya perjuangan Haji Sulong Abdul Kadir, yang akan dibincangkan dalam bahagian berikutnya. Perbincangan seterusnya akan di adakan berkenaan kes-kes demonstrasi yang telah berlaku pada waktu lalu untuk menunjukkan penglibatan golongan elit dan rakyat Patani menentang pemerintahan Thailand.²⁵

b. Aktor-aktor Konflik di Selatan Thailand

Aktor-aktor utama konflik ini terdiri daripada pihak kerajaan, termasuk pegawai kerajaan, polis dan tentera; pihak kumpulan pemisah; serta orang awam yang terdiri daripada kedua-dua kelompok Melayu Islam dan Thai Buddha. Bahagian ini akan melihat secara umum aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini.

c. Penerapan Kebijakan Pemerintah Thailand yang Menyebabkan Konflik di Thailand Selatan

Setelah Siam bertaransformasi menjadi Thailand dengan bentuk pemerintahan monarkhi konstitusional, proses perubahan ini disertai dengan penetapan ideologi baru yaitu nation, king/monarchy, religion. Tiga pilar ini dijadikan sebagai motivasi awal untuk menjadikan Thailand sebagai bangsa yang besar, pilar nation menunjukkan kesatuan bangsa yaitu bangsa Thai, pilar king/monarchy menunjukkan pada dinasti Chakry yang menggerakkan proses modernisasi di Thailand pada agama bangsa Thai yaitu Buddha. Dengan konsep ideologi baru ini membuat masyarakat Thailand Selatan semakin terintegrasi dan dipaksa untuk mengikuti ideologi baru tersebut. Upaya-upaya integrasi yang dilakukan pemerintah Thailand kepada seluruh wilayahnya termasuk bagian Thailand

²⁵ Nik Mahmad,N.A(1999)sejarah perjuangan melayu pattani 1785-1954

Selatan dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan, politik, budaya dan hukum.²⁶

1) Pendidikan

pemerintah Thailand menerapkan sistem pendidikan nasional yang menyatukan semua kelompok agama dan etnis ke dalam satu bangsa dibawah sistem politik baru. Asimilasi pendidikan ini menekankan pada identifikasi tunggal yang didasarkan pada karakter etnisitas (*Siam*), agama (*Budha*), dan linguistik (*bahasa Thai*). Muslim Thailand Selatan menolak kebijakan ini karena mengakibatkan dekulturisasi identitas Melayu-Islam.

2) Politik

Dengan adanya kebijakan ultra nasionalis oleh pemerintah Thailand melalui integrasi administrasi, semua kantor pemerintahan termasuk di Thailand Selatan diurus dan ditentukan oleh pusat. Sentralisasi administrasi ini menyebabkan tidak adanya otonomi bagi Muslim Thailand Selatan di wilayah mereka sendiri, akibatnya banyak pegawai pemerintah yang berasal dari non muslim. Dengan kebijakan ini, muslim Thailand Selatan merasa terancam terhadap eksistensi nilai, tradisi dan agama mereka akibat lembaga pemerintahan diisi oleh orang non muslim.

3) Budaya

Akibat dari pelaksanaan kebijakan ideologi baru yaitu nation, king, religion menimbulkan pemaksaan sekaligus intervensi budaya oleh kelompok mayoritas etnis Thai yang

²⁶ Berita "kongtap phaktisi" 6 November dan 12 November 2004

beragama Buddha kepada minoritas etnis Melayu yang beragama Islam, dimana pemerintah mewajibkan kelompok minoritas untuk menggunakan bahasa, adat istiadat, dan aturanaturan dari kelompok mayoritas.

4) *Hukum*

Pemerintah Thailand menggunakan jalur konstitusi untuk memperlancar agenda integrasinya. Sejak dulu wilayah Thailand selatan menjadikan hukum Islam sebagai aturan hukumnya, semua urusan dilakalangan Muslim diselesaikan dengan norma hukum Islam sampai pada tahun 1939 melalui PM Phibul Songkhran membuat kebijakan kontroversial yaitu menghapus berlakunya hukum Islam dan menggantung dengan hukum sipil Thailand.

Selain karena adanya faktor pengintegrasian dan praktik asimilasi yang dipaksakan pemerintah Thailand terhadap masyarakat Muslim Thailand Selatan, persoalan dari munculnya resistensi dan munculnya konflik adalah ketidakadilan dan marginalisasi yang dirasakan oleh penduduk Muslim Thailand Selatan. Pembangunan ekonomi di wilayah selatan tidak semasif dibandingkan dengan wilayah utara disertai juga dengan program pemerintah Thailand atas nama integrasi yaitu migrasi penduduk bagian utara Thailand yang mayoritas beragama Budha ke bagian selatan yang mayoritas beragama Islam sehingga menambah rasa waspada dan ancaman bagi identitas penduduk Melayu Muslim Thailand Selatan.²⁷

²⁷ Wan Yumil Amri Bin Wan Yunil Khairi, 2017, Jatuhnya Kerajaan Patani dan Dampak Perubahan pada Kehidupan Masyarakat Melayu Patani,

B. Hasil Penelitian

1. Agama Buddha dan Agama Muslim di tiga provinsi perbatasan Thailand selatan hidup bersama. kebijakan pemerintah terhadap penduduk yang tinggal di tiga provinsi Thailand selatan **a. Agama Buddha dan Agama Muslim di tiga provinsi perbatasan Thailand selatan hidup bersama**

Kerukunan hidup berdampingan dalam masyarakat provinsi perbatasan Thailand selatan. koeksistensi sosial akan ada konflik Karena ada perbedaan agama dan pikiran serta perasaan. Tindakan jika ada konflik dan tidak ada penyelesaian akan menimbulkan perpecahan dan berujung pada kemunduran masyarakat Oleh karena itu, persatuan dan rekonsiliasi Oleh karena itu, ini adalah cara untuk membuat tiga provinsi perbatasan selatan menjadi satu dan bersatu sebagai satu solidaritas. Menjaga agar agama Buddha dan Islam tetap lestari.

Dalam hal persatuan atau rekonsiliasi agama Itu tidak berarti bahwa setiap orang memiliki pendapat yang sama di semua sisi. Tapi itu berarti ketika ada perbedaan antar agama di tiga provinsi perbatasan selatan. Mampu memahami dan menerapkan perbedaan untuk mengembangkan kemaslahatan dan sesuai dengan tujuan utama yang ditetapkan oleh kelompok sosial tersebut jika terjadi konflik atau perpecahan. harus menemukan cara untuk menyemen kerukunan persatuan, dan ikatan religius dengan masyarakat itu. untuk dapat memimpin negara melewati segala rintangan bertujuan untuk kemakmuran dengan mempertimbangkan kepentingan bersama sebagai yang utama karena stabilitas tiga provinsi perbatasan selatan.²⁸

Masyarakat yang harmonis Untuk menunjukkan bahwa Buddhisme, Islam, Kristen adalah penganut yang baik yang memiliki

²⁸ Johan Galtung. (1975) .Peace: Research, Education, Action: Essays in Peace Research.1, Copenhagen: Christian Ejlers

keyakinan penuh kepada Tuhan. Pada saat yang sama, mereka dapat hidup bersama dengan orang lain dalam masyarakat. Setiap agama memiliki prinsip dan praktik yang berbeda secara rinci.²⁹ tergantung pada konteks masing-masing agama dan terminologi Dharma tertentu disebut berbeda serempak Agar masyarakat sejahtera dan damai. Tetapi jika ada masyarakat yang terpecah menjadi satu Bahwa masyarakat tidak dapat menemukan kemakmuran dan kedamaian, dan persatuan dapat diperkuat. Hanya ketika orang Thailand memiliki hati nurani publik dengan memperhatikan kepentingan bersama Ada kemurahan hati untuk saling berbagi. menerima perbedaan satu sama lain bergandengan tangan dan mengatasi konflik ditempa menjadi satu bertujuan untuk kemajuan menciptakan hal-hal yang baik Dan perdamaian adalah proses yang menekankan hidup berdampingan secara damai tanpa mengganggu satu sama lain. Tekankan koeksistensi kreatif dan kegiatan bersama yang berkelanjutan. dan berfokus pada menciptakan manfaat dan kebahagiaan bagi orang-orang Organisasi dan anggota masyarakat, terutama setiap orang dan semua pihak harus memperhatikan kesejahteraan. Kemuliaan kedamaian warga orang Thailand bersama-sama dan kemanusiaan bersama Karena pertimbangan tersebut Ini adalah ide kreatif yang indah. akan menjadi awal dari perbuatan baik lainnya bersama-sama dalam masyarakat. Dan terdapat perbedaan suku, budaya, tradisi dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat yang sama.

Dasar-dasar koeksistensi dalam masyarakat yang beragama Harus ada pendekatan koeksistensi yang harmonis yang mengedepankan netralitas yang tidak terlalu ekstrim dengan cara-cara yang berbeda seperti langkah-langkah, metode atau kebijakan untuk menyampaikan kepada anggota umum masyarakat yang memahami keberagaman Masalah utama yang perlu dipertimbangkan ketika mengelola keragaman

²⁹ ohan Galtung. (1996). "Violence Peace and Peace Research", in Journal of Peace

antara kelompok besar dan minoritas adalah: Dan kemudian tentang menjalankan hak di bidang-bidang seperti hak atas kewarganegaraan yang setara, hak politik Kesempatan untuk berkarir, dan lain.³⁰

Dan ketika mempertimbangkan prinsip-prinsip koeksistensi orang dalam masyarakat yang beragam Ada kelompok orang yang hidup bersama yang berbeda dalam suku, budaya, tradisi dan kepercayaan. mata pencaharian masing-masing kelompok terkadang menimbulkan konflik nilai dan sikap yang dapat menimbulkan konflik fisik Oleh karena itu diperlukan adanya prinsip-prinsip koeksistensi manusia dalam masyarakat Proposal prinsip-prinsip koeksistensi dalam masyarakat multikultural telah ditemukan dari penelitian sebagai berikut:

- a) Koeksistensi membutuhkan pemahaman tentang agama masing-masing. Setiap agama harus hidup dalam kerangka agama.
- b) kesetaraan bagi umat Buddha Thailand dan Muslim.

Selain memiliki prinsip hidup bersama atas keberagaman sosial yang menjadi pedoman bagi semua golongan dalam masyarakat untuk diikuti Ada kebijakan lain yang harus diperhatikan dalam hidup berdampingan secara damai, yaitu toleransi terhadap perbedaan dan menerima perbedaan yang pada dasarnya adalah manusia Mereka berbeda dalam aspek fisik dan perilaku. Toleransi terjadi ketika orang-orang dalam masyarakat memiliki penerimaan, dan menghormati satu sama lain yang mengarah pada terciptanya kesatuan hidup berdampingan berdasarkan keragaman sebagai berikut :

1) Prinsip hidup berdampingan dalam komunitas Buddhis

³⁰ -https://www.academia.edu/24448929/Sistem_Pemerintahan_Thailand (SISTEM PEMERINTAHAN, sistem pemerintahan Thailand)

Prinsip hidup berdampingan dalam masyarakat, memahami hakikat masing-masing agama, seperti budaya, tradisi, sistem sosial, dan lingkungan untuk koeksistensi komunitas Buddhis adalah hidup berdampingan secara damai Kedermawanan adalah pemberi bukan penerima Pengorbanan Kedermawanan. saling membantu Integrasi dimulai dengan pendidikan. Belajar dari ruang kelas untuk menanamkan aturan dan keyakinan pada ajaran agama dengan benar tanpa mendistorsi prinsip hidup berdampingan dalam masyarakat kontemporer komunitas Buddhis. Apakah untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran belajar. tanpa prasangka satu sama lain Toleransi terhadap perbedaan Menyesuaikan cara berpikir dan sikap agar sejalan dengan kondisi sosial kebhinekaan.

2) Prinsip hidup berdampingan dalam komunitas Islam

Prinsip hidup berdampingan dalam masyarakat Islam harus mempelajari perbedaan, kesamaan, melihat prasangka, mengenal diri sendiri, melihat, membedakan mana yang fakta Apa kesimpulan dari apa yang dilihat versus apa yang diterima? Harus disaring untuk memisahkan pandangan yang ada melalui stereotype Prinsip dapat dibagi menjadi beberapa sektor, seperti praktik wajib individu. apakah laki-laki atau perempuan sejak beranjak dewasa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan seterusnya dan memiliki kesadaran kemampuan dll.

b. kebijakan pemerintah terhadap penduduk yang tinggal di tiga provinsi Thailand selatan

Kebijakan keamanan terkait dengan provinsi perbatasan selatan yang berisi tentang rencana dan metode penyelesaian masalah keamanan di kawasan yang cukup detail mencakup banyak aspek. Di bawah kebijakan ini dan berdekatan dengan negara-negara dengan budaya serupa Baik aspek sosial, agama dan budaya yang unik.

gambar area yang tersedia Kondisi Masalah Sensitif Rumit dalam hal masyarakat, psikologi, ekonomi, politik dan pemerintahan, terutama kesalahpahaman dan kecurigaan dalam hubungan antara pejabat pemerintah dan rakyat. Kebijakan – kebijakan dari Thailand dalam merespon ketegangan yang terjadi di Thailand Selatan mendapatkan sorotan dari dunia internasional dan dianggap gagal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yang kemudian memaksa Thailand untuk melakukan pendekatan dan strategi baru dalam menangani konflik di Thailand Selatan.

Dan kebijakan untuk administrasi dan pembangunan di provinsi perbatasan selatan diklasifikasikan sebagai kebijakan nasional, instansi pemerintah dan instansi terkait menggunakannya sebagai kerangka operasional utama. dalam menyelesaikan permasalahan di provinsi perbatasan selatan dengan menitikberatkan pada membangun persatuan dan integrasi semua lembaga dalam mengubah kebijakan menjadi praktik dan meningkatkan efisiensi pejabat pemerintah yang bekerja di tiga provinsi perbatasan Thailand selatan. dengan penekanan pada kesinambungan dan partisipasi Untuk menjadikannya bagian penting dalam menyelesaikan masalah provinsi perbatasan selatan, termasuk memberikan arti penting bagi masyarakat multikultural di tiga provinsi perbatasan Thailand selatan kebijakan untuk memecahkan masalah konkrit dan menciptakan perdamaian di provinsi perbatasan selatan. dengan visi yang Mengembangkan partisipasi semua pihak di daerah. bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memecahkan masalah provinsi perbatasan selatan untuk masyarakat Thailand.

Dan masyarakat di daerah Terima dan harga koeksistensi di bawah masyarakat multikultural dan berbagi tanggung jawab untuk memecahkan masalah di provinsi perbatasan selatan. Mengembangkan potensi manusia, masyarakat dan ekonomi yang

sejalan dengan keanekaragaman budaya. dan kearifan lokal Ada kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat secara menyeluruh. menjadi kawasan yang layak huni atraksi wisata yang menarik dan investasi yang menarik untuk membangun kepercayaan dan menjamin kelangsungan proses dialog perdamaian di provinsi perbatasan Thailand selatan. yang ditetapkan sebagai agenda nasional dan mempersiapkan partisipasi semua pihak terkait di bawah lingkungan yang kondusif untuk menemukan jalan keluar dari konflik dan menciptakan pemahaman tentang situasi nyata yang terjadi di masyarakat baik domestik maupun internasional untuk mendukung dan memainkan peran kontribusi dalam memecahkan masalah di provinsi perbatasan thailand selatan.

Pemerintah menggunakan budaya sebagai alat untuk mengendalikan orang melalui kebijakan asimilasi budaya. atau penciptaan budaya baru dalam bentuk Revolusi Kebudayaan penggunaan budaya Untuk memperkuat kekuasaan pemerintah, hal itu juga mengakibatkan penentangan dari masyarakat umum dan lain-lainnya. Dan Karenanya kegagalan untuk berurusan dengan budaya. Sehingga menimbulkan interpretasi baru bahwa budaya bukanlah sesuatu yang memiliki bentuk yang tetap, tidak berubah atau siap pakai. Pemberian makna pada budaya ini berdampak membuat masyarakat menjadi rileks. dan tidak berpegang pada gaya tradisional dari seluruh rangkaian Pada saat yang sama, negara tidak lagi memiliki bentuk yang siap pakai untuk ditegakkan. Hubungan budaya karenanya menjadi hubungan koeksistensi dengan menerima perbedaan. Tidak ada kontrol atas bentuk budaya. dan membuka ruang bagi individu untuk memiliki hak budayanya sendiri.³¹

³¹ Pemerintah Thailand (23 Februari 2017) Wakil Perdana Menteri Jenderal Prawit mempresentasikan kebijakan administrasi dan pembangunan provinsi perbatasan selatan kepada kepala departemen pemerintah di tingkat kementerian dan instansi terkait

1) Sistem Pemerintahan Thailand

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga kestabilan suatu negara. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kamu mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, dan keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang berkelanjutan.

Setiap negara di dunia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Sistem pemerintahan di dunia dibagi menjadi dua, yaitu parlementer dan presidensial. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut.

Dan sistem pemerintahan (*sistem kabinet*) Thailand adalah Sistem Parlementer. Bentuk pemerintahannya adalah Monarki Konstitusional. Sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Thailand dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Dan Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas.

Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional, yang terdiri dari Dewan Perwakilan

(beranggotakan 480 orang) dan Senat (beranggotakan 150 orang). Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung yang jaksanya dilantik oleh raja.

2) Kekurangan dan Kelebihan Sistem Pemerintahan Thailand

• *Kekurangan*

- a) Kedudukan badan eksekutif /kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer.
- b) Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan , karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh kabinet.
- c) Kabinet dapat mengendalikan parlemen, hal ini terjadi bila para anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas, karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai , anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen.
- d) Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

• *Kelebihan*

- a) Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan

legislatif dan eksekutif berada pada suatu partai atau koalisi partai.

- b) Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
- c) Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

2. Perkembangan pedoman hidup berdampingan di tiga provinsi perbatasan selatan

a. Perkembangan pedoman sosial

Sosial Masyarakat pasti dapat memiliki perbedaan dan, budaya, tradisi dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat yang sama. Oleh karena itu, perlu diketahui cara hidup bersama. Dalam suatu masyarakat terdapat berbagai kelompok manusia yang biasa berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama dalam masyarakat, diantaranya Keterampilan komunikasi, berbicara, kerja tim dalam berbagai situasi. Dan berbagai untuk membangun hubungan dengan orang-orang dalam masyarakat dengan cara yang di masyarakat harus berlatih. Dan prinsip lain yang harus diperhatikan dalam hidup berdampingan secara damai. Dalam masyarakat perbedaan memiliki sikap saling menerima dan menghargai. yang mengarah pada terciptanya suatu kesatuan hidup berdampingan berdasarkan keragaman Dan pembangunan merupakan proses gerak dari perubahan pembangunan di tiga provinsi perbatasan selatan dan berhubungan langsung dengan perubahan pembangunan sosial.³²

b. Pedoman mengembangkan provinsi perbatasan Thailand selatan

³² https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=464

Perkembangan tiga provinsi perbatasan selatan Thailand adalah hasil dari perbedaan, agama, identitas, budaya, sikap, ras, dan perilaku lokal. Ini semua adalah masalah yang kompleks, rumit, dan terkait dalam banyak dimensi. Dan agar masing-masing instansi dapat secara sistematis dan terpadu menyelesaikan permasalahan di tiga provinsi perbatasan selatan tersebut, diperlukan adanya instansi utama dalam merumuskan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Menurut Bagian 4 dari Undang-Undang Administrasi Publik di Area Provinsi Perbatasan Thailand Selatan, tahun 2010 bagian 4 Nation dan Kabinet untuk mempertimbangkan dan menyetujui. Setelah Dewan Menteri menyetujuinya, Dewan Menteri akan menyampaikannya kepada Majelis Nasional untuk informasi. Kemudian instansi pemerintah menggunakannya sebagai kerangka operasi yang sistematis dan berkesinambungan di tiga provinsi perbatasan Thailand selatan.

Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan secara konkrit dalam segala dimensi. dengan memfasilitasi proses peradilan dan menegakkan hukum secara adil dan membeda-bedakan, kembangkan hukum yang sejalan dengan cara hidup Dan budaya masyarakat setempat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. dalam sistem peradilan mengembangkan sistem peradilan masyarakat dan proses peradilan alternatif dan kondisi dan sebab-sebab yang menyebabkan masyarakat di daerah merasa terbelah atau secara konkrit ketimpangan. untuk menciptakan perasaan dan suasana bahagia dan martabat mempromosikan nilai dan penerimaan koeksistensi dalam masyarakat multikultural dengan kesetaraan.

dengan menghormati nilai-nilai semua agama di tiga provinsi perbatasan Thailand selatan.

Dan bangsa mementingkan bahasa daerah, budaya dan pendidikan, menanamkan moral dan pada pemuda sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang baik yang memungkinkan proses pertukaran pengetahuan untuk menyadarkan pejabat pemerintah dari semua pihak, memiliki pemahaman dan penerimaan dan melihat nilai identitas budaya dan cara hidup masyarakat di tiga provinsi provinsi Thailand selatan, termasuk berpegang pada prinsip baik dalam operasi untuk memimpin jalan hidup Umat islam dan Umat Buddha dalam kerukunan. Dan praktik semua agama tanpa hambatan. Dengan menyesuaikan sikap yang salah menyesuaikan hukum dan regulasi terkait kondusif untuk kebebasan kehidupan beragama menghilangkan diskriminasi budaya dan masyarakat Thailand untuk hidup bersama secara damai bersama dengan menggabungkan kekuatan untuk memecahkan masalah bersama. oleh ruang komunikasi terbuka Untuk menciptakan pemahaman bersama tentang situasi nyata di tiga provinsi perbatasan Thailand selatan.

Mengembangkan potensi manusia dalam masyarakat melalui percepatan pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan pada semua jenjang untuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan, gaya hidup dan budaya daerah di provinsi perbatasan selatan Thailand dalam hal prinsip, tujuan dan bentuk desentralisasi yang tepat berdasarkan masyarakat di tiga provinsi perbatasan Thailand selatan paling selatan di bawah maksud Konstitusi Kerajaan Thailand agar sesuai dengan prinsip internasional, bukan sebagai syarat yang mengarah pada separatisme serta memberikan fakta kepada masyarakat baik dalam dan luar daerah sudah paham dan

berkontribusi secara konstruktif untuk memecahkan masalah yang timbul dalam kerja sama dengan negara tetangga. organisasi Internasional dan berbagai lembaga swadaya masyarakat tentang fakta tentang situasi di provinsi perbatasan selatan.

c. Pembangunan untuk membangun stabilitas keagamaan

Integrasi yang harmonis untuk memiliki kesamaan konsep pembangunan Koeksistensi, tradisi, politik, bahasa dan budaya terikat bersama dalam hubungan antara agama Buddha dan Islam. Dengan memadukan dan mengintegrasikan pembangunan ke dalam masyarakat berdasarkan kesatuan identitas sosial dan budaya. Dan menunjukkan cara untuk menggerakkan kegiatan yang harus mengacu pada prinsip-prinsip agama dan norma-norma yang baik dari masyarakat. Oleh karena, konsep menggunakan prinsip-prinsip agama dan keyakinan adalah mengintegrasikan partisipasi dalam kegiatan dan proses pembangunan masyarakat yang terkait dengan berbagai dimensi dan persoalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa cara dan cara hidup individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari aspek keagamaan sebagaimana mestinya sesuai dengan konteks masyarakat masing-masing.

3. Solusi pemerintah terhadap permasalahan di tiga provinsi perbatasan Thailand selatan

Pemerintah tiga provinsi perbatasan selatan telah menjadi bagian dalam memecahkan masalah dan pedoman budaya dan ekonomi klub, termasuk partisipasi kedua agama. Perkembangan tersebut menekankan struktur kekuasaan di tingkat komunitas yang membuat pembangunan tetap dimonopoli di tangan elit lokal dan menyebabkan runtuhnya sistem ekonomi dan budaya masyarakat. sampai tidak bisa mengandalkan diri sendiri suatu konflik dalam masyarakat Telah

menciptakan pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan pemerintah Thailand.³³

Kondisi bermasalah, dan lembaga utama yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di setiap pemerintahan telah ditentukan. yang memungkinkan untuk melihat dan memahami dengan jelas proses implementasi kebijakan Secara khusus, masalah integrasi holistik instansi terkait masih kurang efisiensi. Walaupun hasil implementasi kebijakan tersebut sudah terlihat hasil yang diinginkan masyarakat di daerah. yang diketahui faktor-faktor penting dari 3 kelompok variabel utama yang akan mempengaruhi hasil di atas, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan Faktor kompleksitas dalam mengkoordinasikan tindakan berbagai instansi dan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. dan faktor yang lebih penting. seperti faktor penyampaian pesan Penekanan besar harus ditempatkan pada semua tingkat proses kebijakan dari tingkat kebijakan.

Tingkat konversi kebijakan menjadi tindakan Tingkat implementasi kebijakan yang harus diperhatikan sudah sesuai dalam konteks 3 provinsi perbatasan selatan. dengan insiden kekerasan yang terus menerus yang penindasan identitas dalam hal bahasa, agama, tradisi dan budaya. yang Hubungan komunikasi dan pengertian per kelompok dari 3 variabel utama di atas dan faktor kompetensi organisasi harus mendukung dan berkorelasi hingga faktor pembuat

³³ undhuwong, Chalita. 2013. "Economic Life of Malay Muslims in Southernmost Thailand amidst Ecological Changes and Unrest." PhD Dissertation in Anthropology. University of Hawaii at Manoa.

kebijakan seperti kerja sama lembaga terkait, faktor kompleksitas dalam mengkoordinasikan tindakan berbagai lembaga.³⁴

a. Situasi kondisi konflik di tiga provinsi perbatasan selatan

Situasi konflik di tiga provinsi perbatasan selatan Untuk lebih memahami sejarah spasial provinsi perbatasan selatan Ini akan mengarah pada pemahaman tentang masalah yang muncul, menghasilkan saran lebih lanjut untuk manajemen konflik yang lebih baik, terdiri dari Kajian Masalah Konflik di Tiga Provinsi Perbatasan Thailand Selatan. Perkembangan sejarah provinsi perbatasan selatan Kajian pengetahuan tentang tiga provinsi perbatasan selatan. Kajian pengetahuan dalam dimensi masalah konflik. Perkembangan Geopolitik Tiga Provinsi Perbatasan Selatan Asal usul gerakan separatis di provinsi perbatasan selatan Perkembangan Geopolitik Konflik Tiga Provinsi Perbatasan Selatan di tiga provinsi perbatasan Thailand selatan.

b. Kajian Masalah Konflik di Tiga Provinsi Perbatasan Thailand Selatan

Tiga provinsi perbatasan selatan secara budaya berbeda dari wilayah Thailand lainnya. Mayoritas penduduk Islam Dengan populasi kecil umat Buddha Thailand yang tinggal di taman-taman yang tersebar di seluruh wilayah perkotaan dan pedesaan di tiga provinsi perbatasan selatan, yang terdiri dari Pattani, Yala dan Narathiwat, gaya hidup masyarakat di daerah ini memiliki identitas yang unik dan liannya.

Dalam hal komunikasi, sebagian besar masyarakat di daerah tersebut menggunakan bahasa Melayu (*Jawi*) sebagai bahasa sehari-

³⁴ Cornish, Andrew. 1997. *Whose Place is This?: Malay rubber producers and Thai government officials in Yala*. Bangkok, Cheney: White Lotus Press.

hari. yang merupakan bahasa yang sama dengan bahasa Melayu di Malaysia utara. Sebagian besar penduduk di daerah ini memiliki tradisi dan budaya yang sejalan dengan Islam. Dan berbeda dengan budaya utama masyarakat Thailand di daerah tersebut dan pada umumnya. Dan merupakan daerah dengan lingkungan dan konteks yang berbeda dari daerah lain. baik dari segi latar belakang sejarah keragaman etnis agama dan budaya Termasuk situasi kerusuhan yang sedang berlangsung di daerah tersebut. berdampak pada penghidupan dan mata pencaharian masyarakat Bahkan pelaksanaan misi baik instansi pemerintah maupun swasta sangat diperlukan.

Perlu disesuaikan untuk memiliki arah yang konsisten dengan konteks ruang yang berubah. Terutama kisah mayoritas penduduk Thailand yang beragama Islam. menyebabkan perbedaan spesifik dari Mayoritas penduduk di negara tersebut merupakan 2 ciri penduduk yaitu beragama Islam dan merupakan minoritas di negara tersebut. Dan jika digabungkan dengan sejarah kelompok muslim di provinsi perbatasan selatan yang sangat erat kaitannya dengan Malaysia Akibatnya, ada masalah politik. Dan aturan negara selalu, seperti gerakan separatis Dengan membawa perbedaan Dalam hal etnis, agama, dan budaya, digunakan untuk membujuk Muslim Thailand agar bersikap buruk terhadap pemerintah dan membuat perpecahan hingga menimbulkan masalah keamanan nasional.

c. Situasi Konflik di Tiga Provinsi Perbatasan Selatan

Konflik antara negara dan masyarakat di kawasan tersebut, khususnya Melayu Muslim Thailand di provinsi perbatasan selatan, telah ada sejak masa lalu. Karena dari data sejarah telah diketahui bahwa Pattani atau Negara Pattani yang asli memiliki hubungan dengan Kerajaan Thailand di masa lampau yang dapat ditelusuri

hingga ke masa Sukhothai. Menariknya, data menunjukkan bahwa hubungan antara Kerajaan Thailand dan Pattani berbeda tergantung keadaan.

Ditemukan bahwa hubungan semacam itu selalu didasarkan pada kebijakan yang mempengaruhi sikap antara satu sama lain. Masalah kecil, tetapi jika sudah terakumulasi dalam waktu yang lama, akan menjadi masalah besar, seperti memaksa umat Islam untuk berpakaian sesuai dengan aturan negara. Tidak nyaman menghubungi pejabat pemerintah jika mereka masih mengenakan pakaian tradisional. Ini semua mempengaruhi pikiran umat Islam di hampir semua bidang. Upaya menciptakan budaya inti nasional atau, dengan kata lain, membangun Thainess di provinsi perbatasan selatan Seiring dengan berkurangnya umat Islam di masyarakat setempat, terkadang muncul perlawanan dari masyarakat setempat. Untuk, awal penyelesaian konflik harus dimulai dengan memahami dan menerima masalah untuk menentukan akar penyebabnya. Oleh karena itu, kajian ini memisahkan permasalahan kesalahpahaman antara negara dan masyarakat di tiga provinsi perbatasan selatan tersebut ke dalam berbagai aspek sebagai Terdiri dari politik dan pemerintahan Agama dan kepercayaan Aspek sosial dan budaya, ekonomi, pendidikan, proses peradilan dan sejarah Ini untuk memandu pencarian solusi dengan kemungkinan rekomendasi kebijakan. untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar damainya.

Konflik muncul di tiga provinsi perbatasan selatan terkait dengan berbagai elemen spasial Dibagi menjadi 7 aspek yang terdiri dari:

- 1) Politik dan pemerintahan Ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat di daerah tersebut. Faktor-faktor tersebut diangkat sebagai isu politik yang kondusif untuk

menimbulkan konflik hingga akhirnya berubah menjadi kekerasan.

- 2) Agama dan kepercayaan Meskipun agama bukanlah penyebab langsung dari konflik di daerah tersebut, diyakini bahwa Islam telah digunakan untuk membenarkan tindakan para pemberontak di daerah tersebut.
- 3) Ekonomi, kemiskinan dan hak untuk mengakses sumber daya alam masyarakat lokal.
- 4) Aspek sosial dan budaya Pemerintah masih minim pengetahuan dan pemahaman tentang identitas muslim masyarakat di daerah tersebut, sehingga menjadi penindasan terhadap identitas muslim mereka.
- 5) Dalam bidang pendidikan, pemerintah berusaha mengontrol pengelolaan pendidikan lembaga pondok, sehingga menjadi penyebab lain yang menyebabkan masyarakat di daerah tersebut menjadi tidak percaya dan menolak sistem pendidikan negara Thailand.
- 6) Keadilan Disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia dan hak asasi manusia dari banyak kasus. peristiwa kekerasan yang terjadi.³⁵
- 7) sejarah Sebagian masalah keresahan bermula dari persoalan sejarah yang masih digunakan untuk menciptakan perasaan. dan masing-masing pihak memiliki perspektif yang berbeda.

³⁵ Fraser, Thomas M. 1966. Fishermen of South Thailand: The Malay villagers. New York: Holt, Rinehart and Winston.